

## Tinjauan Atas Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

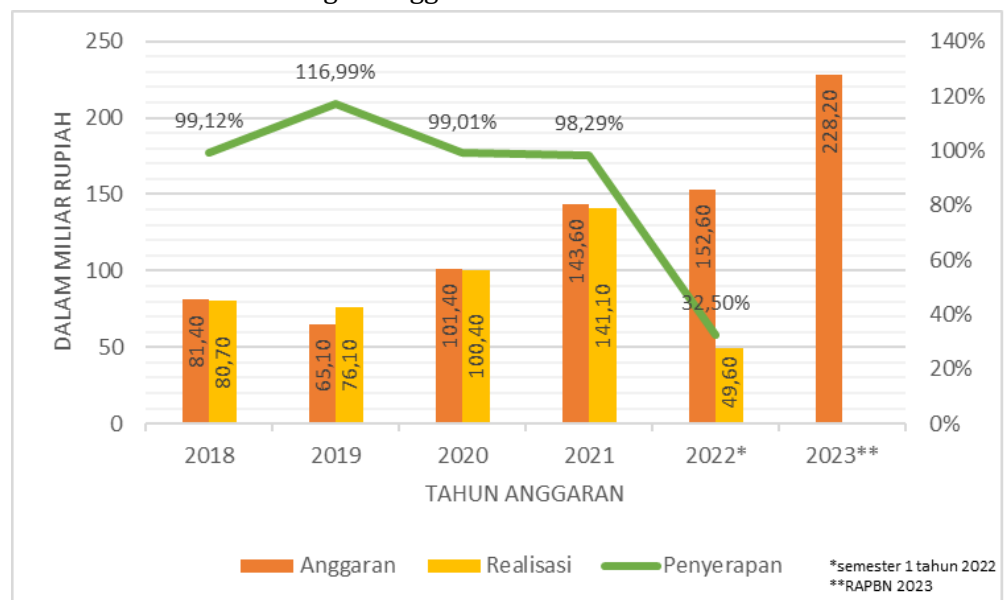
### HIGHLIGHT

- Pada tahun 2022, anggaran LPSK meningkat menjadi Rp152,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
- Peningkatan anggaran diiringi meningkatnya pengaduan hingga per Agustus 2022 mencapai 4.571 pengaduan dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 6.000 per akhir tahun 2022.
- Per Agustus 2022, LPSK masih memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung, dimana jumlah pegawai LPSK hanya berjumlah 220 orang.
- LPSK perlu melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap program, kinerja, dan penyerapan anggaran agar pemerintah dapat mempertimbangkan dalam menetapkan proporsi anggaran selanjutnya serta melakukan penguatan SDM agar dapat memaksimalkan kinerja LPSK.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak saksi juga korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. LPSK menangani sembilan tindak pidana tertentu berupa dugaan pelanggaran HAM berat, terorisme, pencucian uang, korupsi, kekerasan seksual, perdagangan orang, narkoba, penyiksaan, penganiayaan berat, dan tindak pidana lain yang menyebabkan saksi atau korban terancam keselamatan jiwanya. Sejak tahun 2021, LPSK menjadi bagian terpisah dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan memiliki anggaran yang dikelola secara mandiri sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2019 mengenai tugas dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban.

### Perkembangan Anggaran LPSK

Gambar 1. Perkembangan Anggaran dan Realisasi LPSK Tahun 2018-2023



Sumber: Kementerian Keuangan, diolah

LPSK dalam menjalankan program kerjanya berupaya mengoptimalkan program perlindungan bagi saksi dan korban khususnya pelanggaran HAM. Upaya tersebut didukung dengan perolehan anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan ganti kerugian yang terdiri dari restitusi dan kompensasi. Alokasi anggaran yang diterima LPSK dari tahun ke tahun berfluktuasi namun cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, anggaran LPSK meningkat menjadi Rp152,6 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp143,6 miliar. Peningkatan anggaran ditujukan untuk dua program besar, yakni program penegakkan dan pelayanan hukum dan program dukungan manajemen. Dalam LKPP tahun 2021, anggaran kedua program tersebut masing-masing sebesar Rp94,3 miliar dan Rp49,3 miliar dengan penyerapan anggaran mencapai hampir 100 persen.

### PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI

#### Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

#### Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

#### Penulis:

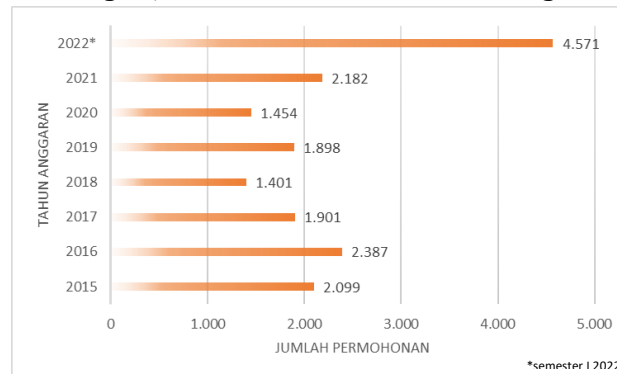
Paramita Permata Sari · Sri Indah Pertiwi · Tiyara Saghira · Leo Iskandar · Ratna Christianingrum

LPSK juga menetapkan dua sasaran strategis yang menjadi target pada tahun 2021. Pertama, terwujudnya perlindungan dan hak-hak saksi dan korban yang berkualitas dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan setiap indikatornya yang telah mencapai 100 persen. Kedua, terwujudnya kelembagaan LPSK yang profesional berbasis teknologi informasi dan sumber daya manusia yang handal dengan setiap indikatornya yang telah mencapai lebih dari 70 persen. Dari pencapaian ini, diharapkan pada tahun 2022 LPSK dapat memanfaatkan tambahan anggaran yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dalam melindungi dan memenuhi hak-hak saksi dan korban secara keseluruhan.

### **Peningkatan Anggaran Tidak Sejalan Dengan Peningkatan Jumlah Pengaduan**

Kenaikan anggaran TA 2022 didasarkan pada capaian kinerja tahun 2021 dan program kerja yang akan dilaksanakan oleh LPSK. Secara keseluruhan pada 2021, LPSK telah memberikan program pemenuhan hak saksi dan korban kepada 2.470 terlindung yang tersebar di 199 kabupaten/kota dalam 31 provinsi. LPSK juga telah memberikan program perlindungan di area domisili terlindung di seluruh Indonesia. Bantuan rehabilitasi medis LPSK pada 2021 diberikan dalam dua bentuk, yaitu biaya medis reguler dan biaya medis dengan kerja sama. Bantuan (rehabilitasi) psikologis bagi saksi dan korban juga telah diberikan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis akibat kejahatan yang dialami oleh saksi dan korban tindak pidana kepada 376 terlindung. LPSK memberikan bantuan rehabilitasi psikososial berupa bantuan pangan, papan, pendidikan, medis dan modal usaha kepada 324 korban tindak pidana.

Gambar 2. Perkembangan Jumlah Permohonan Perlindungan Tahun 2015-2022



Sumber: Laporan Tahunan LPSK, diolah

Pada tahun 2022, meningkatnya anggaran diiringi dengan meningkatnya jumlah pengaduan ditahun yang sama. Peningkatan jumlah pengaduan tersebut lebih dari dua kali lipat dibandingkan rata-rata tahun sebelumnya. Per Agustus 2022, LPSK menyatakan bahwa pihaknya menerima 4.571 pengaduan dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 6.000 per akhir tahun 2022. Hal tersebut mengakibatkan LPSK harus melakukan pengurangan jumlah saksi dan korban yang terlindung dan memberikan batasan waktu dalam program yang dibutuhkan karena keterbatasan anggaran.

### **Keterbatasan SDM LPSK**

Disamping itu, per Agustus 2022 LPSK masih memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mendukung, dimana jumlah pegawai LPSK hanya berjumlah 220 orang. Jumlah pegawai tersebut tidak sebanding dengan banyaknya pengaduan yang masuk sehingga diperlukan pegawai yang banyak pula untuk merespon kebutuhan masyarakat yang menjadi saksi dan korban dengan rasio setidaknya-tidaknya dua orang pegawai yang dapat menjangkau satu kabupaten atau kota atau diperlukan sebesar 1028 orang. Selain itu, pegawai yang bertugas memberikan perlindungan sebagian besar masih berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Mengingat pemerintah menetapkan tahun 2023 menjadi batas akhir status PPNPN, maka hal ini nantinya akan mengurangi SDM di LPSK.

Dari pembahasan di atas, terdapat beberapa catatan yang perlu diperhatikan baik oleh LPSK sendiri maupun Pemerintah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dalam hal dukungan anggaran mengingat capaian kinerja LPSK yang cukup baik sebagai lembaga yang belum lama berdiri sendiri. LPSK perlu meninjau lebih lanjut terkait program, kinerja, dan penyerapan anggaran yang di terima agar pemerintah dapat mempertimbangkan dalam menetapkan proporsi anggaran selanjutnya. Selain itu, dikarenakan jumlah SDM yang terbatas untuk mendukung kinerja LPSK dalam pelaksanaan program, maka LPSK perlu melakukan penguatan kapasitas SDM baik kualitas maupun kuantitas agar dapat memaksimalkan kinerja dan jangkauan kerja LPSK di seluruh wilayah Indonesia.